



**UNJUK RASA** - Para pedagang kaki lima (PKL) Malioboro saat menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1).

## PKL Minta Relokasi Ditunda Tiga Tahun

### ● Pemda DIY Tegaskan Pemindahan Tetap Berjalan

**YOGYA. TRIBUN** - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang sehari-hari berjualan di kawasan Malioboro menyambangi kantor DPRD Kota Yogyakarta, Senin (17/1). Mereka meminta rencana relokasi dapat ditinjau kembali.

Ketua Asosiasi PKL Yogyakarta (AP- KLI), Wawan Suhendra, mengatakan pihaknya mendesak kalangan legislatif untuk ikut memperjuangkan aspirasi para pedagang. Ia berujar, pedagang sebetulnya tidak menolak relokasi, tapi sebisa mungkin pemindahan itu, tak digulirkan tahun ini.

"Kami hanya minta penundaan. Alasannya, ini masih masa pandemi. Presiden Jokowi juga bilang kan, sekarang baru *recovery*, untuk pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Di hadapan Ketua DPRD, Danang Rudhyatmoko, Wawan mendorong legislatif, supaya ikut mengawal kebijakan ini, dengan membuat Panitia Khusus (Pansus). Karena itu, ia berharap, semua fraksi dapat memberikan dukungan, sehingga Pansus benar-benar kuat secara politik.

"Kemudian, selama Pansus masih bergulir, kami meminta pemerintah untuk menghentikan dahulu proses relokasi. Sebab, pada 1-7 (Februari) itu kita diminta sudah harus bo-yongan, tinggal menghitung hari," ujarnya.

Setali tiga uang, Ketua Paguyuban Angkirngan Padma Malioboro, Yati Dimanto pun menyampaikan, bahwa PKL sebenarnya tidak menolak upaya relokasi ini. Hanya saja, pihaknya memohon kepada pemerintah agar kebijakan tersebut tidak dilangsungkan dalam waktu dekat.

"Ya, kami tidak menolak kebijakan relokasi. Tetapi, kami meminta penun- daan pelaksanaannya, paling tidak untuk jangka waktu satu, sampai tiga tahun," tegasnya.

Terlebh, hingga saat ini, paguyub- anyanya belum menerima informasi yang jelas, mereka bakal direlokasi ke mana kedepannya. Karenanya, para, peda- gang sangat khawatir, tempat-tempat yang dialokasikan oleh pemerintah, cenderung tidak representatif untuk berdagang.

DPRD Kota Yogyakarta menegaskan akan membentuk Panitia Khusus (Pan- sus). Selaras rencana, Pansus bakal segera diwujudkan pada Januari 2022 ini.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Da- nang Rudhyatmoko, berujar, sebetulnya menerima audiensi PKL Senin (17/1), sebetulnya legislatif sudah menggodog wacana pembentukan Pansus terse- but. Nantinya, Pansus bakal menjem- batani proses komunikasi, antara PKL dengan Pemkot Yogya.

"Dinamika semakin memuncak, me- nuntut pembentukan Pansus. Sejak awal Januari itu DPRD Kota Yogyakarta telah mencanangkan Pansus. Siang nahti, kita resmikan, sebelum bapak ibu rawuh menuntut ini sudah ada," tandas Danang.

Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono, menyampaikan penataan pedagang menuju dua lokasi itu, adalah upaya penguatan status aktivitas ekonomi pedagang. "Sebelumnya, dengan me- nempati selasar Malioboro, yang me- rupakan bagian kepemilikan pemilik toko, bisa dikatakan keberadaan me- reka adalah informal. Kemudian de- ngan mereka menempati lokasi yang disediakan tersebut, otomatis, aktivi- tas ekonomi beralih menjadi *formal*," lanjutnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ka- darmanta Baskara Aji, menegaskan, Pemda DIY tak bisa memenuhi tuntut- an PKL untuk menunda pelaksanaan relokasi selama beberapa tahun ke de- pan.

Pemda DIY kukuh untuk melakui- kan pemindahan di bulan Januari 2022 ini. "Ya kalau mundur 1-2 hari tidak ada masalah. Prinsipnya bulan ini, sampai februari tidak ada masa- lah, akhir januari tetap dimulai," te- rangnya. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005